

2024

LAPORAN KEUANGAN

**PENGADILAN MILITER
UTAMA 663162**

AUDITED





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER UTAMA**

Jalan Raya Penggilingan, RT 10 RW 4, Penggilingan, Kec. Cakung
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13940, www.dilmiltama.go.id, admin@dilmiltama.go.id

Nomor : 501 /SEK.PMU/KU2.1/V/2025

Jakarta, 7 Mei 2025

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Hal : Penyampaian Laporan Keuangan
Audited Tahun 2024

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Tipe A1 Jakarta VI
Di Jakarta

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta VI Nomor S-808/KPN.1206/2025 Tanggal 30 April 2025 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan TA 2024 Audited Satuan Kerja Mitra KPPN Jakarta VI, dengan ini kami sampaikan Laporan Keuangan Audited Tahun 2024 Pengadilan Militer Utama satuan kerja 663162.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretaris,

Nuratiah

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.


Pengadilan Militer Utama adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Militer Utama mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Militer Utama. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, 7 Mei 2025

Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Militer Utama


Nuratih, S.H., M.H.

NIP. 197109051998032005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vi
RINGKASAN	vii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	ix
NERACA	x
LAPORAN OPERASIONAL	xi
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
A. PENJELASAN UMUM	1
A.1. Dasar Hukum	1
A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis	2
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	3
A.4. Basis Akuntansi	3
A.5. Dasar Pengukuran	4
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	4
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	11
B.1 Belanja	11
B.2 Belanja Barang	12
B.3 Capaian Output	13
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	15
C.1 Persediaan.....	15
C.2 Ekuitas.....	15
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	16

D.1 Beban Persediaan	16
D.2 Beban Barang dan Jasa	16
D.3 Beban Perjalanan Dinas	16
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	18
E.1 Ekuitas Awal	18
E.2 Defisit LO	18
E.3 Transaksi Antar Entitas	18
E.4 Ekuitas Akhir.....	19
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	20
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca.....	20
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	20
F.3. Pengungkapan Lain-Lain	20

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2024.....</i>	<i>111</i>
<i>Tabel 2. Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023</i>	<i>12</i>
<i>Tabel 3. Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023</i>	<i>13</i>
<i>Tabel 4. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran</i>	<i>15</i>
<i>Tabel 5. Rincian Persediaan.....</i>	<i>15</i>
<i>Tabel 6. Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....</i>	<i>16</i>
<i>Tabel 7. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023</i>	<i>16</i>
<i>Tabel 8. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....</i>	<i>17</i>



Pengadilan Militer Utama

Jl. Raya Penggilingan Cakung, Jakarta Timur

Telp. 021-48701705 Fax. 021-48701705 e-mail : dilmiltama@dilmil.org

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Militer Utama Audited Tahun 2024 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Militer Utama telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 7 Mei 2025

Kuasa Pengguna Anggaran

Nuratiah, S.H., M.H.

NIP. 197109051998032005

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Militer Utama Audited Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024. Realisasi Pendapatan Negara periode 31 Desember TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,- dari estimasi pendapatan sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara 31 Desember TA 2024 adalah sebesar Rp464.874.264,00 atau mencapai 99,31 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp468.110.000,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp282.056,00 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp282.056,00 Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,00 Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,-

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp282.056,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00. sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp471.790.033,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp471.790.033,00. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp471.790.033,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp286.000,00 dikurangi defisit-LO sebesar Rp471.790.033,00 dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp471.786.089,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp282.056,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN MILITER UTAMA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PER 31 Desember 2024 DAN 31 Desember 2023

URAIAN	CATATAN	TA 2024			TA 2023		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN							
1. Pendapatan		-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan		-	-	-	-	-	-
BELANJA							
1. Belanja Pegawai		-	-	-	-	-	-
2. Belanja Barang	B.1	468.110.000,00	464.874.264,00	99,31	514.530.000,00	512.538.347,00	99,61
3. Belanja Modal		-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja		468.110.000,00	464.874.264,00	99,31	514.530.000,00	512.538.347,00	99,61

NERACA

PENGADILAN MILITER UTAMA
NERACA
PER 31 Desember 2024 dan 31 DESEMBER 2023

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		2024	2023
1	2	3	4
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C. 1	282.056	286.000
Jumlah Aset Lancar		282.056	286.000
JUMLAH ASET		282.056	286.000
EKUITAS			
Ekuitas	C. 2	282.056	286.000
JUMLAH EKUITAS		282.056	286.000
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		282.056	286.000

LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN MILITER UTAMA
LAPORAN OPERASIONAL
31 Desember 2024 DAN 31 Desember 2023

URAIAN	CATATAN	TA 2024	TA 2023
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA		-	-
PENDAPATAN HIBAH			
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		-	-
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI			
BEBAN PERSEDIAAN	D. 1	11.767.675	17.256.050
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 2	25.322.018	37.850.000
BEBAN PEMELIHARAAN		-	-
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 3	434.700.340	469.298.347
JUMLAH BEBAN		471.790.033	524.404.397
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(471.790.033)	(524.404.397)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS (DEFISIT) LO		(471.790.033)	(524.404.397)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN MILITER UTAMA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	CATATAN	2024	2023
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E. 1	286.000,00	204.000,00
SURPLUS / DEFISIT	E. 2	(471.790.033,00)	(524.404.397,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI		-	-
EKKUITAS			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		-	-
KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR			
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		-	-
Koreksi lain-lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 3	471.786.089,00	524.486.397,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(3.944,00)	82.000,00
EKUITAS AKHIR	E. 4	282.056,00	286.000,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar
Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Pusat;

15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
16. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrua dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2 PROFIL Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Militer Utama

*Profil dan
Kebijakan
Teknis
Pengadilan
Militer Utama*

Rencana Strategis Pengadilan Militer Utama

Rencana Strategis Pengadilan Militer Utama Tahun 2020-2024 merupakan lanjutan dari Renstra Pengadilan Militer Utama Tahun 2015-2019 adalah menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dengan Indikator Sasaran dan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020-2024.

Visi dan Misi Pengadilan Militer Utama

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan Pengadilan Militer Utama menetapkan visi sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER UTAMA YANG AGUNG”.

yang bertujuan agar Pengadilan Militer Utama dan Peradilan Militer dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh Hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Militer Utama adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer Utama sebagai Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesional baik Hakim, Panitera maupun Pegawai di lingkungan Pengadilan Militer Utama.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Utama

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Militer Utama melakukan beberapa sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

*Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Audited Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Militer Utama. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akrua

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Militer Utama menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Militer Utama dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
akuntansi*

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Audited Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Militer Utama yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Militer Utama. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Militer Utama adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Militer Utama adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan persekot gaji;
 - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat	50%

	Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai

dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50

Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.

70

*Kebijakan
Akuntansi
atas
Kewajiban*

(6) Kewajiban

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Militer Utama telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 7 (tujuh) kali dari DIPA awal. Pagu anggaran terlihat sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	468.110.000	468.110.000
Belanja Modal	-	-
Jumlah Belanja	468.110.000	468.110.000

B.1. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara
Rp464.874.264,00

Realisasi Belanja Pengadilan Militer Utama pada periode 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp464.874.264,00 atau 99,31 persen dari anggaran belanja sebesar Rp468.110.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 31 Desember 2024 tersaji sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	-	-	
52	Belanja Barang	468.110.000,00	464.874.264,00	99,31
53	Belanja Modal	-	-	0,00
Jumlah Belanja Bruto		468.110.000,00	464.874.264,00	99,31
Pengembalian Belanja		-	-	0,00
Jumlah Belanja Netto		468.110.000,00	464.874.264,00	99,31

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Realisasi belanja periode 31 Desember 2024 mengalami penurunan dibandingkan realisasi periode 31 Desember 2023. Hal ini antara lain disebabkan oleh penurunan ini diakibatkan penurunan belanja barang pengiriman surat dinas pos, belanja bahan, belanja persediaan konsumsi, belanja jasa profesi, dan belanja perjalanan dinas dalam kota, dan belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota. Perbandingan realisasi belanja periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/ (Penurunan)	
		TA 2024	TA 2023	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	-	-	-	-
52	Belanja Barang	464.874.264,00	512.538.347,00	(47.664.083,00)	(9,30)
53	Belanja Modal	-	-	-	-
Jumlah Belanja Netto		464.874.264,00	512.538.347,00	(47.664.083,00)	(9,30)

B.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp464.874.264,00 dan Rp512.538.347,00. Realisasi Belanja

Belanja

Barang

Rp464.874.264,00

Barang mengalami penurunan sebesar Rp47.664.083,00 atau 9,30 persen dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2023. Penurunan ini diakibatkan penurunan jumlah perkara putus pada tahun 2024 dibandingkan perkara putus tahun 2023.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2024	TA 2023	(Rp)	%
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	451.500,00	4.118.500,00	(3.667.000,00)	(812,18)
Belanja Bahan	19.770.518,00	22.331.500,00	(2.560.982,00)	(12,95)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4.851.906,00	5.390.000,00	(538.094,00)	(11,09)
Belanja Jasa Profesi	4.800.000,00	11.400.000,00	(6.600.000,00)	-
Belanja Jasa Lainnya	300.000,00	-	300.000,00	-
Belanja Perjalanan Biasa	149.117.387,00	136.945.429,00	12.171.958,00	8,16
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450.000,00	1.470.000,00	(1.020.000,00)	-
Belanja Perjalanan DinasPaket Meeting Luar Kota	285.132.953,00	330.882.918,00	(45.749.965,00)	(16,05)
Realisasi Belanja Bruto	464.874.264,00	512.538.347,00	(47.664.083,00)	(10,25)
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	464.874.264,00	512.538.347,00	(47.664.083,00)	(10,25)

B.3. Capaian Output Satuan Kerja

Selama periode Desember Tahun 2024, output satuan kerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Militer Utama sebagai berikut:

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN MILITER UTAMA AUDITED TAHUN 2024

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian	
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	468,110,000.00	464,874,264.00	99.31%					
04	PERADILAN	468,110,000.00	464,874,264.00	99.31%					
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	468,110,000.00	464,874,264.00	99.31%					
1058	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	468,110,000.00	464,874,264.00	99.31%					
AEA	Koordinasi	90,720,000.00	90,677,132.00	99.95%					
001	Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan Militer	90,720,000.00	90,677,132.00	99.95%	7.0000	Kegiatan	9.0000	100%	Pembinaan dan Pengawasan telah selesai dilaksanakan
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	306,300,000.00	306,116,471.00	99.94%					
001	Sosialisasi/Bimtek Kompetensi Penyelesaian Perkara	306,300,000.00	306,116,471.00	99.94%	46.0000	Orang	113.0000	100%	Bimtek telah dilaksanakan
BCA	Perkara Hukum Perseorangan	12,305,000.00	9,340,406.00	75.91%					
U01	Perkara Perbedaan Pendapat yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama	3,905,000.00	2,131,500.00	54.58%	7.0000	Perkara	6.0000	85.6%	Penyelesaian 2 perkara perbedaan pendapat
U02	Perkara Pidana Tingkat Banding yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Tinggi I s.d III	8,400,000.00	7,208,906.00	85.82%	20.0000	Perkara	22.0000	100%	Penyelesaian 4 perkara banding
QCA	Perkara Hukum Perseorangan	58,785,000.00	58,740,255.00	99.92%					
001	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer	58,785,000.00	58,740,255.00	99.92%	3.0000	Perkara	4.0000	100%	Sidang keliling telah selesai dilaksanakan pada bulan Oktober 2024

0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Persediaan

Persediaan
Rp282.056,00

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp282.056,00 dan Rp286.000,00.

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Rincian Persediaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	Mutasi	30 Juni 2024
1	Barang Konsumsi	282.056,00	51.000,00	333.056,00
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
3	Persediaan lainnya	-	-	-
Jumlah		282.056,00	51.000,00	333.056,00

C.2 Ekuitas

Ekuitas
Rp282.056,00

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp282.056,00 dan Rp286.000,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1 Beban Persediaan**

Beban Persediaan
Rp11.767.675,00

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp11.767.675,00 dan Rp17.256.050,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 5. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	11.767.675,00	17.256.050,00	(31,81)
	Total	11.767.675,00	17.256.050,00	(31,81)

D.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan
Jasa
Rp25.322.018,00

Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp25.322.018,00 dan Rp37.850.000,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
1	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	451.500,00	4.118.500,00	(89,04)
2	Beban Bahan	19.770.518,00	22.331.500,00	(11,47)
3	Beban Jasa Profesi	4.800.000,00	11.400.000,00	(57,89)
4	Beban Jasa Lainnya	300.000,00	0,00	-
	Total	25.322.018,00	37.850.000,00	(33,10)

D.3 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas
Rp434.700.340,00

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp434.700.340,00 dan Rp469.298.347,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas,

fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	149.117.387,00	136.945.429,00	8,89
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	450.000,00	1.470.000,00	(69,39)
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	285.132.953,00	330.882.918,00	(13,83)
Total		434.700.340,00	469.298.347,00	(7,37)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**E.1 Ekuitas Awal**

Ekuitas Awal
Rp286.000,00

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp286.000,00 dan Rp204.000,00.

E.2 Defisit LO

Defisit LO
Rp471.790.033,0
0

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah defisit sebesar Rp471.790.033,00 dan Rp524.404.397,00. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

E.3 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
Rp471.786.089,0
0

Nilai transaksi antar ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp471.786.089,00 dan Rp524.486.397,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	464.874.264,00
Diterima dari Entitas Lain	-
Transfer Masuk	6.911.825,00
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
	471.786.089,00

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp0,00, DKEL sebesar Rp464.874.264,00, dan transfer masuk Rp6.911.825,00.

E.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp282.056,00

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp282.056,00 dan Rp286.000,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca per 31 Desember 2024 pada Pengadilan Militer Utama yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 31 Desember 2024.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Tidak terdapat temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI per 31 Desember 2024 pada Pengadilan Militer Utama.

F.3. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Militer Utama untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

1. Rekening pada Satuan Kerja Pengadilan Militer Utama

Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Militer Utama adalah BANK RAKYAT INDONESIA CABANG JAKARTA JATINEGARA A/C 653246631611000 a.n. BPG 17 PM UTAMA (663161) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00

2. Berdasarkan Keputusan Kadilmiltama Nomor 96/KPMU/SK.KU1.1.1/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Penetapan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Pengadilan Militer Utama dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 99/SEK.PMU/SK.KU1.1.1/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Pengadilan Militer Utama dengan susunan sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| a. Kuasa Pengguna Anggaran | : Nuratiah, S.H., M.H. |
| b. PPK | : Try Susanti, S.E. |
| c. PPSPM | : Dwi Mulyanto, S.E., M.M. |
| d. Bendahara Pengeluaran | : Noviani Nistria Susanti |



LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005

ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA 05

SATUAN KERJA : PENGADILAN MILITER UTAMA 663162

Tgl Data : 05/05/25 8:49 AM

Tgl Cetak : 05/05/25 3:32 PM

Halaman : 1

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	468,110,000	464,874,264	(3,235,736)	99.31	514,530,000	512,538,347	(1,991,653)	99.61
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	468,110,000	464,874,264	(3,235,736)	99.31	514,530,000	512,538,347	(1,991,653)	99.61
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005

ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA 05

SATUAN KERJA : PENGADILAN MILITER UTAMA 663162

Tgl Data : 05/05/25 8:49 AM

Tgl Cetak : 05/05/25 3:32 PM

Halaman : 2

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	468,110,000	464,874,264	(3,235,736)	99.31	514,530,000	512,538,347	(1,991,653)	99.61
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 5 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran


Nuratiah, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (663162) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 05/05/25 8:49 AM
Tgl Cetak : 05/05/25 3:32 PM
Halaman : 1

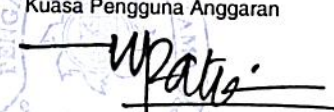
lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	282,056	286,000	(3,944)	(1.38)
JUMLAH ASET LANCAR	282,056	286,000	(3,944)	(1.38)
JUMLAH ASET	282,056	286,000	(3,944)	(1.38)

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	282,056	286,000	(3,944)	(1.38)
JUMLAH EKUITAS	282,056	286,000	(3,944)	(1.38)
JUMLAH EKUITAS	282,056	286,000	(3,944)	(1.38)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	282,056	286,000	(3,944)	(1.38)

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 5 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

Nuratiah, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda 197109051998032005

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (663162) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 05/05/25 8:49 AM

Tgl Cetak : 05/05/25 3:30 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	11,767,675	17,256,050	(5,488,375)	(31.806)
Beban Barang dan Jasa	25,322,018	37,850,000	(12,527,982)	(33.099)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	434,700,340	469,298,347	(34,598,007)	(7.372)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (663162) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 05/05/25 8:49 AM

Tgl Cetak : 05/05/25 3:30 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	471,790,033	524,404,397	(52,614,364)	(10.033)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(471,790,033)	(524,404,397)	52,614,364	(10.033)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(471,790,033)	(524,404,397)	52,614,364	(10.033)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(471,790,033)	(524,404,397)	52,614,364	(10.033)

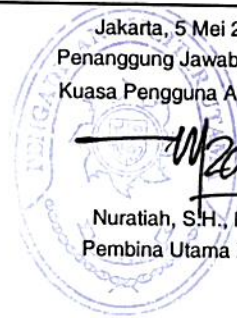
Keterangan :

FINAL

Jakarta, 5 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



Nuratiah, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (663162) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 05/05/25 12:25 PM

Tgl Cetak : 05/05/25 3:32 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	286,000	204,000	82,000	40.2
SURPLUS/DEFISIT-LO	(471,790,033)	(524,404,397)	52,614,364	(10.03)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	471,786,089	524,486,397	(52,700,308)	(10.05)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(3,944)	82,000	(85,944)	(104.81)
EKUITAS AKHIR	282,056	286,000	(3,944)	(1.38)

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 5 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Nuratih, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (663162) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 05/05/25 8:49 AM

Tgl Cetak : 05/05/25 3:32 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	282,056	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	464,874,264
0.0	313221	Transfer Masuk	0	6,911,825
0.0	391111	Ekuitas	0	286,000
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	451,500	0
3.0	521211	Beban Bahan	19,770,518	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	4,800,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	300,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	149,117,387	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	450,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	285,132,953	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	11,767,675	0
JUMLAH			472,072,089	472,072,089

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 5 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Nuratiah, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (663162) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 05/05/25 12:25 PM
Tgl Cetak : 05/05/25 3:32 PM
Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	464,874,264
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	451,500	0
3.0	521211	Belanja Bahan	19,770,518	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4,851,906	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	4,800,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	300,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	149,117,387	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	285,132,953	0
JUMLAH			464,874,264	464,874,264

Keterangan :
FINAL

Jakarta, 5 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

Nuratiah, S.H., M.H.
197109051998032005

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (663162) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 08/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 08/05/24 12:43 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	286,000	0
0.0	313111	Ditagikan ke Entitas Lain	0	512,538,347
0.0	313221	Transfer Masuk	0	11,948,050
0.0	391111	Ekuitas	0	204,000
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,118,500	0
3.0	521211	Beban Bahan	22,331,500	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	11,400,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	136,945,429	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,470,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	330,882,918	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	17,256,050	0
JUMLAH			524,690,397	524,690,397

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 8 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (663162) PENGADILAN MILITER UTAMA

Tgl Data : 08/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 08/05/24 12:44 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	512,538,347
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,118,500	0
3.0	521211	Belanja Bahan	22,331,500	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5,390,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	11,400,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	136,945,429	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,470,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	330,882,918	0
JUMLAH			512,538,347	512,538,347

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 8 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 05 **DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**
WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA : 663162 **PENGADILAN MILITER UTAMA**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/25 3:33 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 5/5/25 10:49 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,600,000	1,922,000	451,500	0	451,500	23.49	1,470,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	5,600,000	1,922,000	451,500	0	451,500	23.49	1,470,500
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	22,340,000	20,657,000	19,770,518	0	19,770,518	95.71	886,482
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	22,340,000	20,657,000	19,770,518	0	19,770,518	95.71	886,482
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5,685,000	5,318,000	4,851,906	0	4,851,906	91.24	466,094
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	5,685,000	5,318,000	4,851,906	0	4,851,906	91.24	466,094
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	9,600,000	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	300,000	300,000	300,000	0	300,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	9,900,000	5,100,000	5,100,000	0	5,100,000	100	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	142,485,000	149,205,000	149,117,387	0	149,117,387	99.94	87,613
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,500,000	755,000	450,000	0	450,000	59.6	305,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	280,600,000	285,153,000	285,132,953	0	285,132,953	99.99	20,047
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	424,585,000	435,113,000	434,700,340	0	434,700,340	99.91	412,660
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	468,110,000	468,110,000	464,874,264	0	464,874,264	99.31	3,235,736
	JUMLAH BELANJA	468,110,000	468,110,000	464,874,264	0	464,874,264	99.31	3,235,736



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Jl. Jend. A. Yani Kav. 58 By Pass Jakarta Pusat 10510 PO. Box. 1148
Telepon (021) 29079177 (Hunting) Fax. 021-29079208, 021-29079205
Website : www.ditjenmiltun.net

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BARANG PERSEDIAAN
Nomor: 2191 /DJMT.1.04/PL1.1.1/XI/2024

Pada hari ini Jumat tanggal satu bulan November tahun Dua ribu dua puluh empat. Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Budi Hadi, A.Md
NIP : 197501291999031005
Jabatan : Kasubbag Perlengkapan Set Ditjen Badilmiltun

Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

2. Nama : Nuratiah, S.H.,M.H.
NIP/NRP : 11990020210475
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Militer Utama

Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Dengan ini pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua Barang Persediaan dengan data sebagai berikut:

NO	KODE KELOMPOK BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA BARANG	HARGA TOTAL
1	1010301005	Buku Agenda Penetapan Hari Sidang	2	Rp 117.900	Rp 235.800
2	1010301005	Buku Agenda Penetapan Penahanan	2	Rp 117.900	Rp 235.800
3	1010301005	Buku Agenda Penetapan Hakim	2	Rp 117.900	Rp 235.800
4	1010301005	Buku Agenda Perkara Permohonan Grasi	2	Rp 117.900	Rp 235.800
5	1010301005	Buku Agenda Perkara Permohonan Peninjauan Kembali	2	Rp 117.900	Rp 235.800
6	1010301005	Buku Agenda Penetapan Pembebasan dari Tahanan	2	Rp 117.900	Rp 235.800
7	1010301005	Buku Agenda Penetapan Pengembalian & Pelimpahan Perkara	0	Rp 117.900	Rp -
8	1010301005	Buku Agenda Perkara Permohonan Kasasi	2	Rp 132.840	Rp 265.680
9	1010301005	Buku Agenda Perkara Permohonan Banding	0	Rp 132.840	Rp -
10	1010301005	Buku Himpunan Putusan	2	Rp 132.840	Rp 265.680
11	1010301005	Buku Agenda Perkara Putus	2	Rp 132.840	Rp 265.680
12	1010301005	Buku Agenda Sidang	2	Rp 117.900	Rp 235.800
13	1010301005	Buku Agenda Putusan Sela	2	Rp 132.840	Rp 265.680
14	1010301005	Buku Register Barang Bukti	0	Rp 117.900	Rp -
15	1010301005	Buku Register Perkara Pelanggaran (Lalin)	0	Rp 132.840	Rp -
16	1010301005	Buku Register Induk Perkara Pidana (kejahatan) Tingkat Pertama	0	Rp 213.870	Rp -
17	1010301005	Buku Register Induk Perkara Pidana (kejahatan) Tingkat Banding	2	Rp 213.870	Rp 427.740
18	1010301005	Buku Agenda Eksaminasi Perkara	2	Rp 158.948	Rp 317.896
19	1010301005	Buku Register Perkara Perbedaan pendapat	2	Rp 158.948	Rp 317.896
		JUMLAH	28		Rp 3.776.852

Catatan:

Penerima barang persediaan tersebut diatas agar segera memberikan BAST ini kepada operator Persediaan/asset BMN untuk di input ke dalam aplikasi SAKTI sebagai Transfer Masuk sesuai dengan data yang diberikan.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

Nuratiah, S.H.,M.H.



PIHAK PERTAMA

Budi Madi, A.Md





BERITA ACARA
SERAH TERIMA BARANG PERSEDIAAN
Nomor: 2214 /DJMT.1.04/PL1.1.1/XI/2024

Pada hari ini Jumat tanggal satu bulan November tahun Dua ribu dua puluh empat. Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Budi Hadi, A.Md
NIP : 197501291999031005
Jabatan : Kasubbag Perlengkapan Set Ditjen Badilmiltun

Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

2. Nama : Nuratiah, S.H.,M.H.
NIP/NRP : 11990020210475
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Militer Utama

Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Dengan ini pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua Barang Persediaan dengan data sebagai berikut:

NO	KODE KELOMPOK BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA BARANG	HARGA TOTAL (Rp)
1	1010301005	Buku Statistik	1	243.615	243.615
2	1010399999	Buku Agenda Sidang Hakim	4	246.350	985.400
3	1010399999	Buku Agenda Sidang Panitera	5	246.350	1.231.750
4	1010301005	Kalender	1	133.248	133.248
5	1010399999	Buku Rumusan Ketua Kamar Peradilan Militer	4	135.240	540.960
JUMLAH			15		3.134.973

Catatan:

Penerima barang persediaan tersebut diatas agar segera memberikan BAST ini kepada operator Persediaan/asset BMN untuk di input ke dalam aplikasi SAKTI sebagai Transfer Masuk sesuai dengan data yang diberikan.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

Nuratiah, S.H.,M.H.

PIHAK PERTAMA

Budi Hadi, A.Md



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER UTAMA

Jalan Raya Penggilingan, RT 10 RW 4, Penggilingan, Kec. Cakung
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13940, www.dilmiltama.go.id, admin@dilmiltama.go.id

BERITA ACARA OP NAME FISIK (STOCK OPNAME) PERSEDIAAN
PENGADILAN MILITER UTAMA
005.05.0100.663162.000.KD

Pada hari ini, Jumat Tanggal 3 Bulan Januari Tahun 2025, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :





1. Nama : Nuratiah, S.H., M.H.
NIP : 197109051998032005
Jabatan : **Kuasa Pengguna Anggaran / Barang**
2. Nama : Kapten Chk Thomas Willem R Imbiri, S.E., S.H.
NRP : 21930118770373
Jabatan : **Kasubbag TU Dan Rumga**
3. Nama : Try Susanti, S.E.
NRP : 199506062020122005
Jabatan : **Pengelola Keuangan**
4. Nama : Herdian Syahfrudin, A.Md.T.
NIP : 199412292019031006
Jabatan : **Operator Persediaan**

Menyatakan bahwa telah melakukan **Stock Opname** barang persediaan Bulan Desember Tahun 2024, sebagaimana terlampir dalam lampiran berita acara opname fisik (*Stock Opname*). Adapun total Nilai Barang per 31 Desember 2024 meliputi ;

- | | |
|---|-------------------------|
| a. Barang Konsumsi | : Rp. 282.056,00 |
| b. Amunisi | : |
| c. Bahan Untuk Pemeliharaan | : |
| d. Suku Cadang | : |
| e. Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga | : |
| f. Pita Cukai dan Leges | : |
| g. Bahan Baku | : |
| h. Barang Dalam Proses / Setengah Jadi | : |
| i. Tanah / Bangunan Untuk Dijual | : |
| j. Hewan dan tanaman untuk dijual | : |
| k. Total | : Rp. 282.056,00 |

Demikian Berita Acara Persediaan ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Stock Opname :

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---|
| 1. Nuratiah, S.H., M.H. | Kuasa Pengguna Anggaran/Barang |  |
| 2. Thomas W R Imbiri, S.E., S.H. | Kasubbag TU Dan Rumga |  |
| 3. Try Susanti, S.E. | Pengelola Keuangan |  |
| 4. Herdian Syahfrudin, A.Md.T. | Operator Persediaan |  |




UPPB-Eselon I : SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG
UPPB-Eselon II : PENGADILAN MILITER UTAMA

LAPORAN HASIL INVENTARISASI BARANG PERSEDIAN (STOCK OPNAME)

Kode Satuan Kerja : 005.05.0100.663162.000.KD
Nama Satuan Kerja : Pengadilan Militer Utama

No	Kode Barang	Nama Barang	Type / Merk	Tahun Perolehan	Kuantitas Barang			Satuan	Harga Satuan (Rp)	TOTAL	Kondisi Barang			Ket
					Menurut Administrasi	Hasil Inventaris	Selisih				B	R	U	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14
1	000009	Tipe-x	JOYKO	2024	1	1	0	Pcs	5,000	5,000	✓			
2	000032	Business File Jenia	JENIA	2024	1	1	0	Lusin	25,308	25,308	✓			
3	000015	Kertas F4 BMO 75gr	BMO	2024	1	1	0	Rim	77,256	77,256	✓			
4	000019	Kertas A4 BMO 75gr	BMO	2024	1	1	0	Rim	62,604	62,604	✓			
5	000024	Post it mark	JOYKO	2024	1	1	0	Pcs	11,988	11,988	✓			
6	000005	Flashdisk 64GB		2024	1	1	0	Pcs	99,900	99,900	✓			
Jumlah										282,056				

Jakarta, 3 Januari 2025
Pengurus Persediaan


Herdian Syahfrudin, A.Md.T.